

I.PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan salah satu hal penting yang menjadi permasalahan di Indonesia, terutama di pedesaan. Masyarakat desa dinilai lebih membutuhkan pembangunan dilihat dari faktor ekonomi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 pasal 63, pemerintahan desa wajib memiliki Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP). RPJM-Desa merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa selama 5 (lima) tahun. RPJM-Desa tersebut memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan dengan disertai rencana kerja. Kepala desa yang terpilih akan membuat rencana pembangunan desa bersama dengan perangkat desa lainnya.

Untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan dibutuhkan partisipasi seluruh masyarakat desa. Partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan dari suatu pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan sangat penting karena masyarakat yang mengetahui segala

permasalahan yang ada serta cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Keterlibatan masyarakat diharapkan dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan.

Salah satu tahapan pelaksanaan pembangunan dimulai dari tahap perencanaan pembangunan. Pada tahap perencanaan pembangunan, pemerintah mengupayakan adanya partisipasi masyarakat dengan diadakannya musrenbang. Musrenbang dilakukan secara berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi hingga nasional. Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Di dalam musrenbang tersebut masyarakat dapat mengajukan usulan atau pendapatnya dalam perumusan rencana pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat dalam perumusan rencana pembangunan desa akan memiliki tiga dampak penting yaitu 1) masyarakat akan terhindar dari peluang manipulasi. Keterlibatan masyarakat secara langsung akan memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki masyarakat, 2) memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, semakin banyak yang terlibat maka semakin baik, 3) meningkatkan kesadaran dan ketrampilan politik masyarakat (Dea Deviyanti, 2013: 380-394 vol 2).

Berdasarkan hasil pra riset penulis, desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara merupakan sebuah desa pemekaran dari desa Candimas Kecamatan Abung Selatan. Desa Kembang Gading baru berdiri sendiri sejak tahun 2010 lalu. Sebagai desa yang baru mekar seharusnya masyarakat desa Kembang Gading bersemangat untuk memajukan desanya. Salah satunya dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa kembang Gading. Namun, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih rendah. Hal itu dapat terlihat dari data daftar hadir masyarakat pada saat rapat mengenai perencanaan pembangunan desa. Dalam musrenbang tersebut, terdapat 40 orang yang hadir dalam rapat dari 128 orang undangan. Jadi baru sekitar 30% - 40% partisipasi masyarakat di desa Kembang Gading.

Pembangunan desa Kembang Gading dapat dikatakan masih belum berjalan baik. Pembangunan tidak hanya dari pembangunan fisik tetapi ada juga pembangunan non fisik. Pembangunan fisik seperti jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya. Kurangnya pembangunan fisik terlihat dari keadaan jalan di desa Kembang Gading yang masih jalan tanah merah, kurangnya fasilitas penunjang kehidupan masyarakat seperti sekolah yang masih tidak layak dari sarana dan prasarana yang ada (foto terlampir). Sedangkan pembangunan non fisik seperti pemberdayaan masyarakatnya. Terlihat dari kondisi masyarakat di desa tersebut. Tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah. Sehingga masyarakat perlu meningkatkan pembangunan desa.

Kurangnya partisipasi masyarakat seperti yang dikatakan oleh Ridwan pada wawancara tanggal 14 Februari 2014, Sekretaris Desa Kembang Gading bahwa kurangnya partisipasi masyarakat salah satunya adalah masalah waktu pelaksanaan rapat yang dianggap warga bukan waktu yang tepat. Pelaksanaan rapat di Desa Kembang Gading dilaksanakan pada malam hari, dengan alasan sebagian besar mata pencaharian warga bekerja sebagai petani. Masyarakat harus bekerja dari pagi hari hingga sore hari, kemudian malam hari warga lebih banyak memilih untuk beristirahat daripada menghadiri rapat.

Desa kembang Gading baru berdiri sendiri menjadi sebuah desa sejak 3 tahun lalu. Maka program-program pembangunan yang ada di desa Kembang Gading juga belum berjalan dengan baik. Salah satu program pembangunan yang ada di desa Kembang Gading adalah program PNPM-MP. PNPM mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan umum PNMPM-MP adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Sedangkan tujuan khusus dari program ini adalah untuk meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang sering diabaikan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan (petunjuk operasional PNPM-MP, 2007 :6).

Menurut Ridwan, sekretaris desa Kembang Gading mengatakan bahwa program PNPM-MP sudah masuk ke desa Kembang Gading. Namun, pelaksanaannya belum maksimal. Hal tersebut karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program PNPM-MP tersebut. Sedangkan menurut salah seorang warga kurangnya partisipasi masyarakat mengenai program tersebut karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Desa mengenai program tersebut. Peranan Kepala Desa yang seharusnya mempunyai pengaruh penting dalam pembangunan ke arah lebih baik menjadi tidak penting apabila Kepala Desa tidak menjalankan peranannya dengan baik. Sehingga masyarakat pada akhirnya memilih pasif.

Berdasarkan ketentuan dasar PNPM mandiri, setiap desa dapat mengajukan 3 (tiga) usulan untuk dapat didanai dengan BLM PNPM Mandiri Perdesaan. Setiap usulan harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan / satu paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan. Ketiga usulan tersebut adalah usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau peningkatan kapasitas / ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan, Usulan kegiatan simpan pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% dari BLM kecamatan. Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok dan usulan kegiatan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan

peningkatan kapasitas / ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah perencanaan desa

Desa Kembang Gading juga memiliki salah satu usulan program PNPM-MP untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan yaitu SPP (Simpan Pinjam Perempuan). Program SPP merupakan program pengembangan usaha kecil yang dilakukan oleh perempuan. Syarat dari penerima program SPP di desa Kembang Gading adalah perempuan-perempuan janda yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri, perempuan miskin yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Hasil penelitian sejenis yang dilakukan oleh Imam Luqmana di desa Ketangirejo Kecamatan godong Kabupaten Grobogan, pada tahun 2013 didapatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program PNPM-Pedesaan masih rendah. Faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat di Desa Ketangirejo adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari usia, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Faktor eksternal adalah manajemen program dari para *stakeholder* yaitu pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan konsultan/fasilitator. (jurnal Luqmana, vol 2 no 1, 2013)

Kemudian hasil penelitian sejenis yang lainnya yang dilakukan oleh Ramli di desa Mantang Lama tahun 2012 partisipasi masyarakat dalam program PNPM-MP sangat tinggi. Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dibedakan dalam 5 tahap yaitu tahap inisiasi, perencanaan, desain, konstruksi, operasional dan

pemeliharaan. Pada Tahap Inisiasi, pada tahap ini partisipasi masyarakat sangat tinggi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Khayrul di desa Lodaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih rendah. Hal ini karena pemerintah desa belum memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan partisipasinya. Keputusan masih didominasi oleh pemerintah desa serta orang-orang tertentu saja yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat di desa Kembang Gading masih rendah. Maka, peneliti tertarik untuk meneliti **“Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalahnya adalah apa faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat? (studi kasus di desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)

C.Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa rendah? (studi kasus di desa Kembang Gading Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)

D.Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Membuktikan teori yang dikemukakan oleh Watson bahwa faktor penyebab rendahnya partisipasi adalah faktor internal (faktor individu) dan faktor eksternal (orang-orang yang berkepentingan dalam pembangunan). Faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dengan melihat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Imam Luqmana di desa Ketangirejo bahwa faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah faktor internal (umur, status warga di kelurahan, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan dan pendapatan.) dan faktor eksternal adalah manajemen program yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dalam pembangunan (pemerintah daerah, pengurus kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat dan fasilitator). Faktor internal yang paling mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat adalah pekerjaan masyarakat. Faktor pekerjaan yang tidak bisa mereka tinggalkan. Masyarakat lebih memilih untuk berpartisipasi yang dapat memberikan keuntungan

terhadap kebutuhan ekonomi mereka dibandingkan bekerja untuk kepentingan bersama.

Faktor internal lain yang ikut berperan dalam mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat adalah pendidikan, status warga dan pendapatan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Ketangirejo menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat. Faktor pendidikan mempengaruhi seseorang terhadap kemajuan cara berfikir. Cara berfikir yang kurang maju karena rendahnya tingkat pendidikan tersebut menimbulkan sifat apatis terhadap tindakan-tindakan dan pemikiran yang maju lewat program-program yang disediakan oleh pemerintah, salah satunya adalah program PNPM Mandiri. Masyarakat desa Ketangirejo umumnya berpenghasilan rendah. Pendapatan yang rendah tersebut mengakibatkan masyarakat lebih memilih fokus pada pemenuhan hidup pribadi dan keluarganya.

Selain faktor pendapatan dan pendidikan masyarakat yang rendah, status warga desa Ketangirejo menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi. Status warga yang dimaksud adalah masyarakat yang dilibatkan dalam program PNPM Mandiri. Pengurus PNPM-Mandiri hanya melibatkan masyarakat yang berkepentingan dalam pelaksanaan proyek pembangunan, karena hal ini dianggap lebih efisien dan cepat serta tidak memerlukan keterlibatan masyarakat dalam jumlah besar.

Faktor eksternal yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat adalah kurangnya peran dari faktor eksternal dalam sosialisasi program. Baik pemerintah desa maupun pengurus RT/RW tidak menginformasikan

mengenai program PNPM secara intensif, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui program-program apa saja yang akan direncanakan dalam PNPM-mandiri. Selain itu pengurus PNPM Mandiri tidak melibatkan seluruh masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan kepada perangkat desa dan warga desa Kembang Gading untuk lebih meningkatkan peranannya agar desa menjadi lebih baik lagi. Hal ini terlihat dari hasil pra riset peneliti bahwa partisipasi masyarakat dalam membuat rencana pembangunan masih rendah. Perencanaan pembangunan dilakukan dengan mengadakan rapat musrenbang. Berdasarkan daftar hadir musrenbang, partisipasi masyarakat desa Kembang Gading masih rendah.

Keterbukaan dan kejelasan dalam memberikan informasi kepada masyarakat harus lebih diperjelas lagi agar masyarakat mengerti mengenai rencana-rencana program pembangunan yang akan dilaksanakan. Keberhasilan program pembangunan dimulai dari perencanaan pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi awal keberhasilan pembangunan. Pemerintah desa harus lebih terbuka lagi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. penyampaian informasi juga harus jelas ssssshingga masyarakat tertarik untuk mengikuti alur pembangunan.